

**SKRIPSI**

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KEPEMILIKAN SENJATA API  
ILEGAL OLEH WARGA SIPIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG SENJATA API”**

**(Studi Putusan No: 994/Pid.Sus.LH/2017/PN.Jkt.Sel Jo. Putusan No:  
270/PID.SUS.LH/2018/PT.DKI)**



**Oleh:**

**NAMA : LUTHFY ABBAD DUDIKOFF**

**NIM : 163112330040230**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NASIONAL**

**TAHUN 2022**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Luthfy Abbad Dudikoff  
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 01 Juni 1997  
Nomor Pokok Mahasiswa : 163112330040230  
Program studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Universitas Nasional  
Alamat : Jl.Pengadegan Barat blok L No.2 Komplek Poiri, Pancoran,  
Jak-sel  
No Handphone : 085939468776

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi yang saya buat berjudul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL OLEH WARGA SIPIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG SENJATA API"** (Studi Putusan No: 994/Pid.Sus.LH/2017/PN.Jkt.Sel Jo. Putusan No: 270/PID.SUS.LH/2018/PT.DKI) adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah di publikasikan oleh siapa pun. Semua data yang saya gunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan adalah orisinil. Bila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jakarta, 27 Mei 2022



Luthfy Abbad Dudikoff

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul skripsi : "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL OLEH WARGA SIPIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG SENJATA API"

(Studi Putusan No: 994/Pid.Sus.LH/2017/PN.Jkt.Sel Jo. Putusan No: 270/PID.SUS.LH/2018/PT.DKI)

Skripsi ini di pertahankan oleh tim penguji pada tanggal 5 Maret 2022 di nyatakan LULUS dengan nilai A predikat Sangat Memuaskan.

Jakarta, 27 Mei 2022

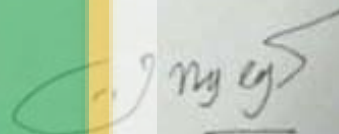
Mengetahui,

Dekan



Prof. Dr. Basuki Reksa Wicaksono, S.H., M.S.

Pembimbing

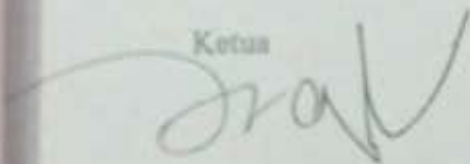


Sugiyono, S.H., M.H.



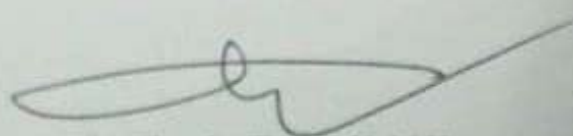
Tim penguji,

Ketua



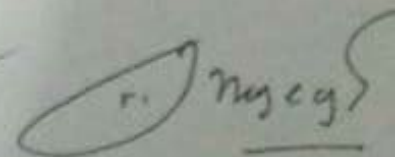
Dr. Drs. TB Ali Asgar, S.H., M.H.

Anggota



Dr. Chandra Tirta, S.H., M.H.

Anggota



Sugiyono, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Maraknya kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil cukup meresahkan masyarakat. Kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat / sipil, tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor keamanan. Sebagian orang kepemilikan senjata api digunakan untuk melindungi dirinya, sebagian orang lain kemungkinan digunakan aksi kejahatan mereka. Guna mengantisipasi penyalahgunaan senjata api dan mencegah peredaran secara ilegal, dibuatlah peraturan Undang-Undang No. 12/Drt/ Tahun 1951 untuk mengontrol peredaran senjata api ilegal serta Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/82/II/2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Nonorganik TNI / Polri. Penelitian Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis menggunakan data sekunder yang mengkaji permasalahan mengenai aturan hukum terkait perizinan kepemilikan senjata api oleh warga sipil yang sah beserta pertanggungjawaban secara pidana terhadap Gatot Brajamusti yang memiliki senjata api tanpa izin (*illegal*) berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 994/Pid.Sus.LH/2017/PN.Jkt.Sel Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No: 270/PID.SUS.LH/2018/PT.DKI sesuai Peraturan yang berlaku dengan pendekatan kasus (*Case approach*). Hasil dari penelitian ini telah diketahui bahwa *pertama*, aturan hukum terkait perizinan kepemilikan senjata api oleh warga sipil yang sah didasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/82/II/2004, *kedua* Pertanggungjawaban Pidana Gatot Brajamusti yang memiliki senjata api *illegal* dalam Putusan No: 994/Pid.Sus.LH/2017/PN.Jkt.Sel Jo. Putusan No: 270/PID.SUS.LH/2018/PT.DKI yang memvonis pidana selama 1 (satu) tahun lebih rendah dari tuntutan Jaksa yakni 3 (tiga) tahun Penerapan hukumnya telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan KUHP. Seharusnya Pemerintah membuat regulasi kepemilikan serta penyalahgunaan senjata non-organik TNI/Polri secara lebih relevan dan melakukan Revisi terhadap Undang-Undang Darurat tentang Senjata Api.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Kepemilikan Senjata Api, Ilegal.

## **ABSTRAK**

*The rise of illegal possession of firearms by civil society is quite disturbing to the public. Ownership and use of firearms by the community / civilians cannot be separated from several security factors. Some people use firearms to protect themselves, others may be used for their crimes. In order to anticipate the misuse of firearms and prevent illegal distribution, Law no. 12/Drt/ of 1951 to control the circulation of illegal firearms and the Decree of the National Police Chief No.Pol.: Skep/82/II/2004 concerning the implementation of supervision and control of non-organic weapons of the TNI / Polri. This thesis research uses a normative juridical research method with descriptive analysis using secondary data that examines problems regarding legal rules related to licensing of firearms ownership by legitimate civilians along with criminal liability for Gatot Brajamusti who owns firearms without permission (illegal) based on the Act. Emergency Law Number 12 of 1951 concerning Firearms in the Decision of the South Jakarta District Court No: 994/Pid.Sus.LH/2017/PN.Jkt.Sel Jo. High Court Decision No: 270/PID.SUS.LH/2018/PT.DKI in accordance with applicable regulations with a case approach. The results of this study show that firstly, the legal rules regarding the licensing of firearms ownership by legitimate civilians are based on the Decree of the National Police Chief No.Pol.: Skep/82/II/2004, secondly the Criminal Liability Officer of Gatot Brajamusti who owns illegal firearms in the Decision. No: 994/Pid.Sus.LH/2017/PN.Jkt.Sel Jo. Decision No: 270/PID.SUS.LH/2018/PT.DKI which sentenced a criminal for 1 (one) year lower than the prosecutor's demands, namely 3 (three) years. Firearms and the Criminal Procedure Code. The government should make regulations on the ownership and misuse of non-organic weapons by the TNI/Polri in a more relevant manner and revise the Emergency Law on Firearms.*

*Keywords: Criminal Liability, Possession of Firearms, Illegal.*

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama dan paling utama di hati ini, penulis panjatkan puji dan rasa syukur yang amat besar kepada ALLAH SWT. Berkat rahmat, karunia dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan segenap suka cita. Penyusunan Skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Nasional dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL OLEH WARGA SIPIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG SENJATA API”** (Studi Putusan No: **994/Pid.Sus.LH/2017/PN.Jkt.Sel Jo. Putusan No: 270/PID.SUS.LH/2018/PT.DKI**) Kelancaran proses penulisan Skripsi ini berkat bimbingan, arahan, motivasi dan kerjasama yang amat besar dari berbagai pihak hingga terselesaikannya tesis ini. Selain itu, ucapan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya oleh penulis yang disampaikan kepada :

1. Ibu Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A selaku Rektor Universitas Nasional Jakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta. Terima kasih atas setiap kebijakan, dukungan dan selalu berpihak pada Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum.
3. Bapak Dr. Sugiyono, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang selalu menjadi Suri Tauladan khususnya bagi Penulis dan Rekan-rekan Mahasiswa Sarjana Hukum Lainnya, karena tidak hanya memberikan bimbingan secara akademik yang meliputi pada subtansi materi dan Teknis Penulisan Tesis kepada Penulis, namun Pembimbing juga sering support dan mengajak dan bercerita tentang sekolah kehidupan setelah lulus sarjana Hukum yang akan menghadapi tantangan lebih berat dan menguji ilmu hukum penulis di masyarakat khususnya dalam bidang profesi Kepolisian. Terimakasih sudah sangat baik dan maksimal memberikan saran dan masukan ilmu hukumnya yang sangat bermanfaat kepada penulis selama proses penulisan Skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Penguji Proposal Skripsi dan Penguji Sidang Skripsi beserta Para Dosen di Program Studi Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta yang selama ini telah bekerja keras dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum kepada penulis untuk bekal penulis di masa depan nanti.
5. Para Pegawai/ Staf lainnya di Sekretariat Program Studi Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Nasional yang selama ini telah bekerja dengan sangat baik, Sabar dan Ramah dalam memberikan setiap pelayanan administrasi dan berbagai informasi seputar perkuliahan kepada para Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum sehingga Penulis bisa lulus dan menyelesaikan Studi Sarjana Ilmu Hukum.
6. Ibunda Dewi Ambariyah dan Bapakku Budiono tersayang dan seluruh Keluarga beserta Sdri. Metyana selaku Teman Hidup yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis baik secara moril dan materiil dalam keluarga.
7. Rekan-rekan Mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta khususnya Keluarga Besar Angkatan Tahun 2016 khususnya dan Rekan lainnya yang telah berjuang bersama penulis baik dalam menempuh setiap jam perkuliahan untuk mencapai gelar Magister Hukum maupun kebersamaan diluar perkuliahan kampus serta banyak memberikan dukungan-dukungan positif kepada penulis.
8. Seluruh Keluarga Besar dan Rekan-Satu Angkatan S440dara di Mabes Polri yang telah memberikan Support dan motivasi untuk berjuang dalam menjalankan tugas negara sebagai Profesi Polisi hingga akhirnya penulisan skripsi ini juga bisa diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih dalam proses pembelajaran dan belum sempurna Oleh karena itu, segala kritik, saran, motivasi yang sifatnya mendidik dan membangun kearah yang lebih baik, senantiasa penulis terima dengan terbuka dan lapang dada.

Jakarta, 09 September 2021

Hormat Penulis

Luthfy Abbad Dudikoff

## DAFTAR ISI

	Hal
	aman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Pokok Permasalahan .....	14
I.3 Tujuan Penelitian .....	14
I.4 Manfaat Penelitian .....	15
I.5 Kerangka Teoritis .....	15
Kerangka Konseptual .....	22
I.6 Metode Penelitian .....	26
I.7 Sistematika Penulisan .....	31
 <b>BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG SENJATA API DAN PROSEDUR KEPEMILIKAN SENJATA API TERHADAP MASYARAKAT SIPIL BESERTA TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN SENJATA API SERTA PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA.</b>	
<b>A. Senjata Api, Prosedur Kepemilikan Senjata Api secara Legal</b>	



<b>beserta Pengaturanya</b> .....	34
1. Pengertian Senjata Api .....	34
2. Prosedur Kepemilikan Senjata Api secara Legal Terhadap Masyarakat Sipil.....	37
3. Tindak Pidana Yang Berkaitan dengan Kepemilikan Senjata Api Ilegal. ....	42
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.</b> .....	47
1. Pengertian Pidana dan Jenis Pidana .....	47
2. Pengertian Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan.....	51
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO: 994/Pid.Sus.LH/2017/PN.Jkt.Sel Jo. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA No: 270/PID.SUS.LH/2018/PT.DKI a.n TERDAKWA GATOT BRAJA MUSTI</b>	
A. Posisi Kasus .....	55
B. Fakta Hukum.....	59
C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....	87
D. Tuntutan Penuntut Umum .....	96
E. Amar Putusan .....	99
 <b>BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL OLEH WARGA SIPIL BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No: 994/Pid.Sus.LH/2017/PN.Jkt.Sel Jo. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA No: 270/PID.SUS.LH/2018/PT.DKI.</b>	

A. Aturan Hukum Terkait Perizinan Kepemilikan Senjata Api Oleh Warga Sipil yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ..... 103

B. Pertanggungjawaban secara pidana oleh warga sipil dalam hal ini Gatot Brajamusti yang memiliki senjata api tanpa izin (*illegal*) berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 994/Pid.Sus.LH/2017/PN.Jkt.Sel Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No: 270/PID.SUS.LH/2018/PT.DKI..... 114

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 140

B. Saran ..... 142

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

